

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

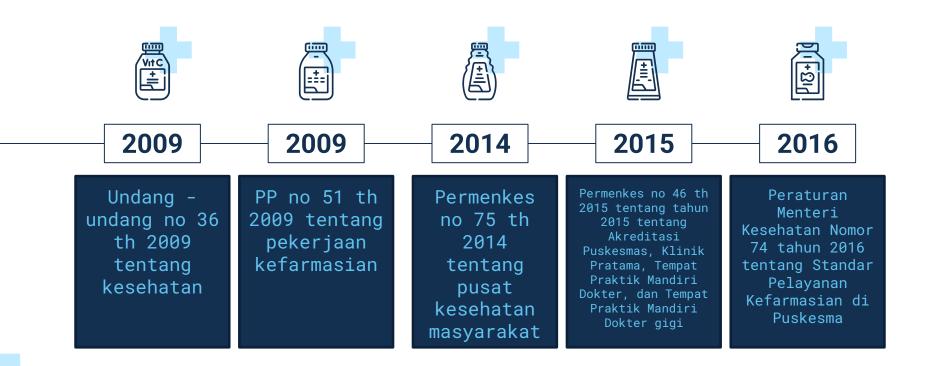
apt. Febriana Astuti, M. Farm

Pendahuluan

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

 Fungsi poko puskesmas : sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama, secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.upaya kesehatanya terdiri dari empat pilar yaitu upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dasar Hukum



Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian adalah

- Suatu pelayanan langsung
- Bertanggung jawab kepada pasien
- Berkaitan dengan sediaan farmasi
- Dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

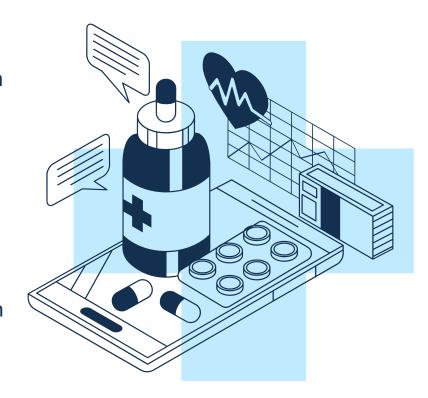
Pelayanan Kefarmasian harus sesuai dengan standar (PP No. 51/2009 tentang pekerjaan Kefarmasian)

- Kegiatan pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan.
- Pelayanan kefarmasian berorientasi pada pasien (patient orientid) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (pharmaceutical care).
- Farmasis berkolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam meningkatkan outcome terapi obat dalam menjamin keselamatan pasien.



Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

- Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- Harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai :
- 1. Merupakan penggerak pembagunan berwawasan kesehatan.
- 2. Pusat pemberdayaan masyarakat dan
- 3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarkat.



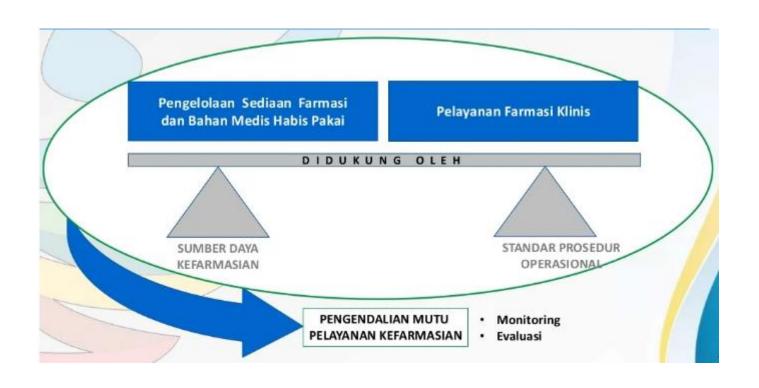
Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas sesuai ketentuan pada Permenkes 74/2016

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk

- 1. Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.
- 2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian
- 3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety)

Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.



Peran Tenaga Farmasi di Puskesmas







Manajerial

Pengelolaan Obat dan BMHP

Klinikal Farmasi

Pelayanan Farmasi Klinik

Publik Health

Peran serta di masyarakat dalam upaya promotif dan preventif





Tujuan Pengelolaan Perbekalan Farmasi dan BMHP

- Menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif dan rasional
- 2. Meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian
- 3. Mewujudkan sistem informasi manajemen.
- 4. Melaksanakan pengendalian mutu palayanan

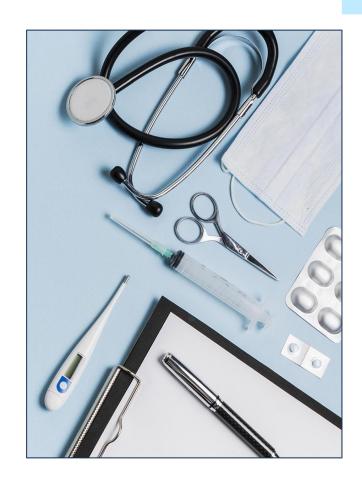
Pengelolaan Perbekalan Famasi dan BMHP





Pelayanan Farmasi Klinik

- 1. Pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat.
- 2. Pelayanan informasi obat
- 3. Konseling
- 4. Visite (khusus pasien rawat inap)
- 5. Pemantauan dan pelaporan efek samping obat.
- 6. Pemamtauan terapi obat



Peran Apoteker Puskesmas Pada Public Health

Peran Apoteker Agent Of Change (AoC)





Pembina Keluarga

PIS-PK



Keluarga mengikuti KB



Ibu bersalin di faskes



Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap



Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan



Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan



Penderita TB Paru berobat sesuai standar



Penderita hipertensi berobat teratur



Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan



Tidak ada anggota keluarga yang merokok



Keluarga mempunyai akses thd air bersih



Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat



Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes



Penerapan standar dalam kondisi pandemi

- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui telemedicine dapat dilakukan selama kedaruratan kesehatan masyarakat atau di masa pandemi Covid-19 dalam rangka pencegahan Covid-19
- Farmasis melakukan pelayanan obat dalam telemedicine sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Pelayanan farmasi klinik seperti konseling, PIO, Meso dapat dilakukan secara daring untuk meningkatkan keselamatan pasien. Penyerahan obat dapat dilakukan melalui jasa pengantaran dengan memenuhi ketentuan.



SDM Kefarmasian di Puskesmas

- Penyelenggara pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh 1 orang apoteker penanggung jawab dibantu oleh apoteker lain atau TTK sesuai kebutuhan.
- Jumlah kebutuhan apoteker dan tenaga kefarmasian lain dihitung berdasarkan analisis beban kerja.
- Apoteker dan TTK harus memenuhi syarat administratif berupa STR dan SIP.



Sarana dan Prasarana

- Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi.
- Ruang Farmasi harus memenuhi fungsi :
- 1. Ruang penerimaan resep
- 2. Ruang pelayanan resep
- 3. Ruang penyerahan obat
- 4. Ruang konseling
- 5. Ruang penyimpanan obat dan BMHP
- 6. Ruang Arsip



Pengendalian Mutu Pelayanan Kefarmasian



Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah terkait obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan/medikasi yang bertujuan untuk keselamatan pasien.



Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian terintegrasi dengan program pengendalian mutu pelayanan kesehatan puskesmas yang dilaksanakan berkesinambungan.

Contoh pengendalian mutu

1. MANAJEMEN FARMASI

- Pengendalian Obat Rusak dan Kadaluarsa
- Pengendalian Ketersediaan Obat

2. PELAYANAN FARMASI KLINIK

Internal

- Waktu tunggu pelayanan resep
- Kejadian terkait patient safety (KNC, KTD)
- Data Pelayanan Konseling



Strategi Peningkatakan POR



Stategi Peningkatan POR di FASKES



Strategi Peningkatan POR di Masyarakat



Pemantauan dan evaluasi POR

Pelaporan



Laporan Pelayanan Kefarmasian secara berjenjang dilaporkan Kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kementerian Kesehatan. Pelaporan ke Kemenkes disampaikan paling sedikit setiap triwulan.

Pembinaan



Pembinaan dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, BPOM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pengawasan



Pengawasan dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, BPOM sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.



